



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl Bangun Praja Banjarbaru**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan karunianya jualah penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Renja ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa Shalawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Renja Tahun 2019 ini disusun sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

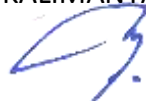
Kami menyadari masih banyak kekurangan pada penyusunan dokumen ini, dan kami mengharapkan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh segenap jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan investasi yang pada akhirnya sebagai pengantar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Banjarbaru,

2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Ir. H. Nafarin, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 198903 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 072 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi urusan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan investor dalam hal pengurusan perizinan dan nonperizinan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 04 tahun 2014 bahwa seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilimpahkan kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (renja) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun lalu / terakhir.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran SKPD serta tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja SKPD, tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan penanaman modal, serta uraian program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2017 yakni peningkatan investasi. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp8,1 Trilyun. Selain itu juga ditargetkan persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 15%. Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi (Pencapaian)
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8.100.000.000.00 0	6.248.820.000.000
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (77.50)	B (78.80)

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2017, DPMPTSP Prov.Kalsel melaksanakan 8 (delapan) Program yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

- I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran dan kesekretariatan)
 - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan Kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - e. Penyediaan alat tulis kantor kinerja/fisik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - i. Penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - j. Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - m. Penataan perpustakaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - n. Penyediaan jasa teknis perizinan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - c. Pengadaan komputer dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

- g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan:
 - a. Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir tahun dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - b. Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 7 dokumen perencanaan dan pelaporan.

II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.328.780.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.165.536.750,- atau 95,10% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.700.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.592.484.550,- atau 93,68% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan pameran di dalam dan luar negeri sebanyak 11 kali dan potensi investasi daerah yang dipromosikan sebanyak 10 potensi: pembibitan dan penggemukan sapi potong, industri semen, pengolahan rumput laut, budidaya ikan kerapu, pengeloaan ikan air tawar, Kawasan Industri Jorong, Kawasan Industri Batulicin, wisata Pasar Terapung, pengembangan Loksado, Industri Hilir kelapa sawit.

b. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 291.261.300,- atau 97,07% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah jumlah kemitraan dunia usaha 3 Kemitraan.

c. Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 278.780.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 262.277.550,- atau 94,08% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di bidang Penanaman Modal 2 kali: 1) Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal serta SPIPISE ; 2) Izin Usaha dan SPIPISE, 1 Dokumen Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan terkait SPIPISE, 1 Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal di Kalimantan Selatan.

d. Kegiatan Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 386.425.300,- atau 96,61% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 100% tersedianya bahan promosi investasi sebanyak 6 item yaitu: spanduk, brosur, buku, baliho, Leaflet, dan banner. Jumlah sektor potensi investasi yang teridentifikasi sebanyak 2 (dua) dokumen yakni Potensi Pariwisata Pesisir Pantai Daerah Kalimantan Selatan ; dan Dokumentasi Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Perkembangan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan di Kalimantan Selatan .

e. Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 333.571.550,- atau 95,31% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah Inventarisasi dan updating data SIPID, LKPM online, investasi, perizinan dan non perizinan dengan realisasi 100% dan Kab/Kota yang telah menggunakan SIPID 5 Kab/Kota dan SPIPISE (LKPM online) 11 Kab/Kota sehingga capaian sebesar 61,00%.

- f. Kegiatan Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 299.561.500,- atau 99,85 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya forum investasi Kalimantan Selatan, dimana mempromosikan 2 kawasan industri dan 8 potensi investasi strategis Kalimantan Selatan.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 994.801.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 794.464.600,- atau 79,86% dan realisasi fisik sebesar 90,40%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
- a. Kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 391.871.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 323.261.900,- atau 82,49 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force kepada perusahaan sebanyak 83 BAP.
- b. Kegiatan Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 338.780.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 218.524.300,- atau 64,50 % dan realisasi fisik sebesar 88,37%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring evaluasi ke 76 perusahaan.
- c. Kegiatan Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 264.150.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 253.036.000,- atau 95,79% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan Rakernis atau RKPPMD dan Rakorpus atau KP3MN dengan persentase rekomendasi hasil Rakor yang ditindaklanjuti 100,00%.
3. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 336.550.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 311.508.200,- atau 92,56% dan realisasi fisik sebesar 81,43%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
- a. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 24.000.000,- dan teralisasi sebesar

Rp. 23.713.200,- atau 98,81 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah melaksanakan survey kepuasan terhadap pemohon perizinan dan non perizinan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 78,80% (B).

b. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2008

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 312.550.000 dan teralisasi sebesar Rp. 287.795.000,- atau 92,08% dan realisasi fisik sebesar 80,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan penyusunan dokumen standar pelayanan berdasarkan SMM ISO 9001:2015.

4. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.069.530.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.020.766.900,- atau 95,44% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 118.804.500,- atau 91,39% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri sebanyak 2 kali, yaitu: 1) bidang kehutanan (pengelolaan hasil hutan) di Alalak, 2) bidang perikanan di Muara Kintap.

b. Kegiatan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 68.133.000,- atau 96,64% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisai perizinan bidang perekonomian dan sosial sebanyak 13 kali.

c. Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 56.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 53.441.200,- atau 95,43% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi perizinan dengan Instansi terkait dan Kab/Kota sebanyak 6 kali.

d. Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi sebesar

Rp. 43.777.500,- atau 87,56% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi perizinan bidang produksi dan industri dengan Instansi terkait dan Kab/Kota sebanyak 1 kali yang menghasilkan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan.

- e. Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 114.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 111.904.000,- atau 97,73% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin sebanyak 41 kali.

- f. Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Produksi dan Industri

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 140.748.500,- atau 93,83% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin sebanyak 35 kali.

- g. Kegiatan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan secara online

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 498.530.000 dan teralisasi sebesar Rp. 483.958.200,- atau 97,08% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah tersedianya aplikasi dan database perizinan secara online.

PENGUKURAN KINERJA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,829,982,000.00	3.317.319.100	86.61			100.00
	• Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Tersedianya jasa teknis perizinan	282,840,000.00	281.992.000	99.70	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penataan Perpustakaan	Terlaksananya penataan perpustakaan	58,856,000.00	57.631.600	97.92	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Rapat-rapat koordinasi dan	Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah	350,000,000.00	347.859.000	99.39	12 bulan	12 bulan	100.00

	konsultasi dalam daerah							
	• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,174,000,000.00	979.400.000	83.42	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	356,510,000.00	279.827.000	78.49	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	330,560,000.00	198.156.500	59.95	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,500,000.00	71.203.000	70.85	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	132,000,000.00	125.906.500	95.38	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	110,000,000.00	109.639.000	99.67	12 bulan	12 bulan	100.00

	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan	205,000,000.00	204.891.100	99.95	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	202,800,000.00	193.750.000	95.54	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya listrik, air dan komunikasi	426,416,000.00	372.054.900	87.25	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	15,500,000.00	10.066.400	64.94	12 bulan	12 bulan	100.00
	• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85,000,000.00	84.941.500	99.93	12 bulan	12 bulan	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		3,829,982,000.00	3.317.319.100	86.61			100.00
Persentase Pemenuhan Sarana dan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,606,095,000.00	1.369.899.220	85.29			100.00

Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	193,000,000.00	176.510.300	91.46	75 buah	75 buah	100.00
	• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	77,000,000.00	64.322.140	83.54	8 buah	8 buah	100.00
	• Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer	100,000,000.00	82.494.880	82.49	10 unit	10 unit	100.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	371,572,000.00	370.550.800	99.73	100%	100%	100.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	388,190,000.00	224.417.200	57.81	20 unit	20 unit	100.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	161,000,000.00	146.835.900	91.20	7 unit	7 unit	100.00

	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	315,333,000.00	304.768.000	96.65	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		1,606,095,000.00	<i>1.369.899.220</i>	85.29			100.00
Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang Paham	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		300,000,000.00	214.807.000	71.60			100.00
	• Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300,000,000.00	214.807.000	71.60	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		300,000,000.00	214.807.000	71.60			100.00
Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		145,000,000.00	143.429.500	98.92			100.00
Persentase aset yang tercatat	• Penatalaksanaan Perencanaan dan	Tersedianya dokumen penatalaksanaan,	120,000,000.00	118.429.500	98.69	7 Dok	7 Dok	100.00

Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	Pelaporan Program Penanaman Modal	perencanaan dan pelaporan kinerja						
	• Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	25,000,000.00		100.00	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		145,000,000.00	143.429.500	98.92			100.00
Nilai Persetujuan / Rencana Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3,328,780,000.00	3.165.536.750	95.10			100.00
	• Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Terlaksananya Rakor Kawasan Industri Batulicin	300,000,000.00	299.561.500	99.85	1 kali forum	1 kali forum	100.00
	• Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Terlaksananya pelatihan SIPID kepada Kab/Kota, Terlaksananya updating data SIPID	350,000,000.00	333.571.550	95.31	2 kali pelatihan/ sosialisasi 1 tahun updating data 13 Kab/Kota	2 kali pelatihan/ sosialisasi 1 tahun updating data 13 Kab/Kota	100.00

• Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi pelayanan penanaman modal	278,780,000.00	262.277.550	94.08	2 kali pelatihan/ sosialisasi 1 dok evaluasi kebijakan PM 13 Kab/Kota	2 kali pelatihan/ sosialisasi 1 dok evaluasi kebijakan PM 13 Kab/Kota	100.00
• Penyusunan Dokumen (BUKU) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	Tersedianya data dan informasi potensi penanaman modal	400,000,000.00	386.425.300	96.61	6 item bahan promosi 2 dok kajian	6 item bahan promosi 2 dok kajian	100.00
• Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya pameran investasi	1,700,000,000.00	1.592.484.550	93.68	10 kali	10 kali	100.00
• Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Terlaksananya koordinasi untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha	300,000,000.00	291.261.300	97.07	2 kemitraan	3 kemitraan	100.00
Rata-rata capaian kinerja		3,328,780,000.00	3.165.536.750	95.10			100.00

Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		994,801,000.00	794.464.600	79.86			90.40
	• Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	Terlaksananya RKPPMD, KP3MN dan sinkronisasi program terkait pengembangan penanaman modal	264,150,000.00	252.678.400	95.66	2 kali 100%	2 kali 100%	100.00
	• Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi	Terlaksananya monitoring evaluasi	338,780,000.00	218.524.300	64.50	86 perusaha an	76 perusaha an	88.00
	• Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force	391,871,000.00	323.261.900	82.49	83 BAP	74 BAP	86.00
	Rata-rata capaian kinerja		994,801,000.00	794.464.600	79.86			90.40

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik		336,550,000.00	311.508.200	92.56			81.43
	• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan pemohon perizinan	24,000,000.00	23.713.200	98.81	2 dok IKM	2 dok IKM	100.00
	• Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008	Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan	312,550,000.00	287.795.000	92.08	1 dok ISO	1 dok ISO	80.00
	Rata-rata capaian kinerja		336,550,000.00	311.508.200	92.56			81.43
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan		1,069,530,000.00	1.020.766.900	95.44			100.00
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	Terlaksananya pelayanan perizinan dibidang produksi dan industri	150,000,000.00	140.748.500	93.83	1 tahun	1 tahun	100.00

• Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Tersedianya aplikasi dan database perijinan secara online	498,530,000.00	483.958.200	97.08	1 aplikasi 1 server	1 aplikasi 1 server	100.00
• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	Terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin	114,500,000.00	111.904.000	97.73	1 tahun	1 tahun	100.00
• Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Terlaksananya koordinasi perijinan dengan instansi terkait dan kab/kota	56,000,000.00	53.441.200	95.43	6 kali 100%	6 kali 100%	100.00

	• Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	Terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri	130,000,000.00	118.804.500	91.39	2 kali	2 kali	100.00
	• Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel	Terlaksananya sistem pelayanan perizinan yang transparan	70,500,000.00	68.133.000	96.64	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100.00
	• Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Terlaksananya pelayanan perijinan dibidang produksi dan industri	50,000,000.00	43.777.500	87.56	1 kali 100%	1 kali 100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		1,069,530,000.00	1.020.766.900	95.44			100.00
	Rata- rata capaian kinerja keseluruhan		11,610,738,000.00	10.337.731.270	89.04			98.25

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

**“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; Dan
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;

3.1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020 mengacu pada **Misi 5**.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara sasaran utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019
1	2	3	4
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	10,5 Trilyun Rupiah
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	“A” (80)

Adapun Indikator Kinerja Penunjang sebagai berikut :

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019
1	2	3	4
1	Peningkatan Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	“BB” (75)
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 Kerjasama
		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	13 Potensi
		Persentase Rekomendasi Hasil Rakor/Forum dan Kebijakan yang ditindaklanjuti	100%
3.	Peningkatan Efektifitas Promosi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	11,7 Trilyun

4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	22%
		Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	50%
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri	B
		Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Produksi dan Industri sesuai SOP	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial	B
		Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sesuai SOP	100%
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri	B
		Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal sesuai SOP	100%

3.2. Fungsi, Uraian Tugas, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 072 tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

3.2.1. Tugas Pokok

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

3.2.2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

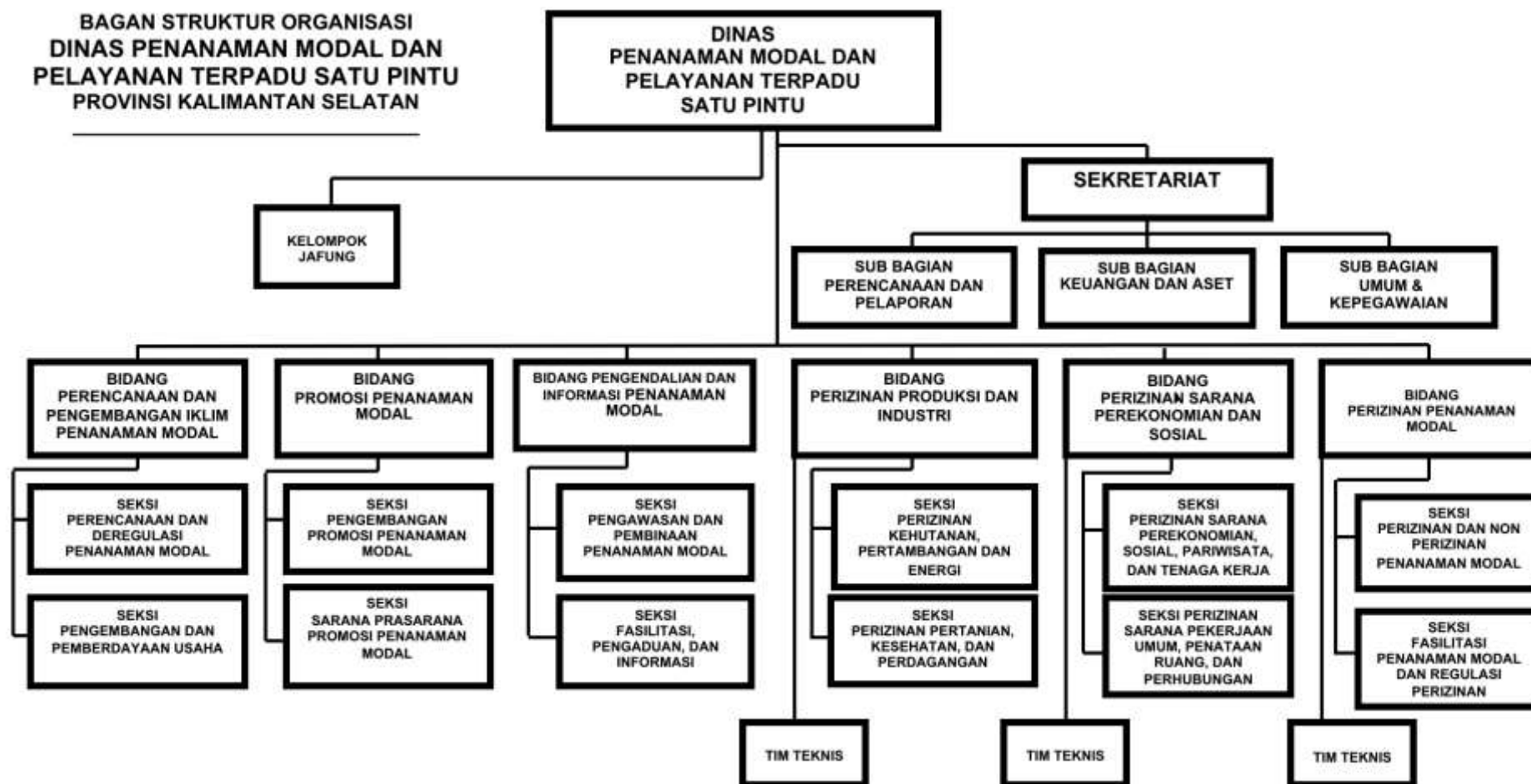
- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal
- d. Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri
- f. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial
- g. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

3.2.3. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian :
 - i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - iii. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Sarana Promosi Penanaman Modal
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim penanaman terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
- e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Fasilitasi, Pengaduan, dan Informasi
- f. Bidang Perizinan Produksi dan Industri terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi
 - ii. Sub Bidang Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan
- g. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial terdiri dari 2 sub bidang:
 - i. Sub Bidang Perizinan Sarana Perekonomian, Sosia, Pariwisata, dan Tenaga Kerja
 - ii. Sub Bidang Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
- h. Bidang Perizinan Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang
 - i. Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



GOVERNOR OF KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2019 yakni : “Bergerak Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Kalsel Mapan” dengan 13 Prioritas pembangunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung prioritas ke-12 yakni Kalsel menuju daerah industri, perdagangan, dan jasa.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal. Dinas PM dan PTSP Prov.Kalsel menjalankan 3 (tiga) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan.

Dinas PM dan PTSP telah menerapkan hasil evaluasi pohon kinerja (*casecading*) oleh tim dan Kementerian PAN RB. Adapun *casecading* DPMPTSP Prov.Kalsel terlampir

Dalam pelaksanaannya, Dinas PM dan PTSP melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari 5 (lima) program rutin / kesekretariatan dan 3 (tiga) program urusan penanaman modal / nonrutin, yakni:

Rutin kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Non rutin / urusan

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

Program pembangunan tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pemberdayaan usaha
- b. Penyelenggaraan Pameran Investasi
- c. Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah
- d. Evaluasi RUPM, Pengembangan Kebijakan Investasi, dan Inventarisasi Potensi Investasi
- e. Forum Investasi Kalimantan Selatan
- f. Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi
- g. Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal
- h. Sosialisasi Perizinan
- i. Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel
- j. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Penerbitan Izin dan Evaluasi Perizinan
- k. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan SMM berbasis ISO 9001
- l. Pelayanan Penanaman Modal
- m. Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat
- n. Penyusunan dan Perbaikan Indeks Kepuasan Masyarakat
- o. Program Kegiatan Kesekretariatan

Adapun usulan dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 terlampir sebagai bahan usulann pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.

BAB IV

PENUTUP

Perjanjian dan kesepakatan internasional terkait perdagangan bebas, kini gencar dilakukan, oleh pemerintah tanpa pernah mencoba melihat dampak yang akan ditimbulkan. Indonesia sendiri telah menyepakati area perdagangan bebas, diantaranya : asean free trade Agreement (AFTA), Indonesia – Jepang EPA, Asean – China FTA, Asean – Korea FTA. Sedangkan yang masih dalam tahap perundingan adalah Asean – India FTA, Asean – EU FTA, Asean – Australia – New Zealand FTA. Sementara zona perdagangan bebas antara Indonesia – AS FTA dan Indonesia – EFTA (Swis, Leichestein, Norwegia dan Island), Masih dalam proses Pra-negosiasi dan jooint study group. Salah satu yang menyita banyak perhatian hari ini adalah kesepakatan zona perdagangan bebas antara persekutuan negara-negara asean (termasuk Indonesia), dengan china upaya mengatasi dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan investasi memerlukan upaya maksimal dari seluruh sektor terkait dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kondisi keamanan dalam negeri serta upaya memulihkan kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di daerah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, antara lain diperlukan sumber daya manusia yang handal serta prasarana dansarana yang mendukung harus lebih dahulu dibenahi dan dilengkapi.

Pelimpahan kewenangan penanaman modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah memerlukan persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan pentahapan-pentahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terlaksana rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan ditingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai.

Banjarbaru,

2018

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,**



Ir. H. Nafarin, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 198903 1 011

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIAT

PENINGKATAN INVESTASI, dgn indikator:
1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, dgn indikator:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN IKLIM PM

Kinerja Utama:
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha
2. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan
3. Persentase Rekomendasi hasil Rakor/Forum dan kebijakan yang ditindaklanjuti

Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal

Kinerja Utama:
Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Rekomendasi (berita acara) hasil Rakor/Forum
2. Evaluasi Kebijakan PMPTSP & RUPM
3. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang terinventarisir

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Kinerja Utama:
Pengembangan Pemberdayaan Usaha, dgn indikator:
1. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha

BIDANG PROMOSI

Kinerja Utama:
Peningkatan Efektifitas Promosi, dgn indikator:
1. Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Kinerja Utama:
Pengembangan Promosi Investasi, dgn indikator:
1. Jumlah Item Media Promosi Investasi
2. Jumlah Sektor Potensi Investasi yang teridentifikasi
3. Pelaksanaan Forum Investasi (Forum, Rakor, Duta) yang ditindaklanjuti

Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi, dgn indikator:
1. Jumlah Potensi investasi daerah yang dipromosikan
2. Jumlah Pelaksanaan Pameran investasi

BIDANG PENGENDALIAN & INFORMASI PM

Kinerja Utama:
Pengendalian Pelaksanaan PM, dgn indikator:
1. Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM
2. Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan

Seksi Pengawasan dan Pembinaan PM

Kinerja Utama:
Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan Pembinaan PM, dgn indikator:
1. Persentase Pengawasan Perusahaan PM
2. Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya

Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi

Kinerja Utama:
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi, dgn indikator:
1. Inventarisasi dan Updating data SIPID, Investasi, Perizinan dan Non Perizinan
2. Persentase Kab/ Kota yang telah Menggunakan SIPID dan LKPM online
3. Persentase pengaduan yang difasilitasi

BIDANG PERIZINAN PRODUKSI & INDUSTRI

Kinerja Utama: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Produksi & Industri, dgn indikator:
1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi & Industri
2. Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sesuai SOP

Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan & Energi

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Energi, & Perkebunan, dgn indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Energi, & perkebunan yang dapat diproses

Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan & Perdagangan

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pertanian, Kesehatan & Perdagangan, dgn indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pertanian, Kesehatan & Perdagangan yang dapat diproses

BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN & SOSIAL

Kinerja Utama: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial, dgn indikator:
1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial
2. Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sesuai SOP

Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata & Tenaga Kerja

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata & Tenaga Kerja, dgn indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata & Tenaga Kerja yang dapat diproses

Seksi Perizinan Sarana PU, Penataan Ruang & Perhubungan

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana PU, Penataan Ruang & Perhubungan, dgn indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sarana PU, Penataan Ruang & Perhubungan yang dapat diproses

BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Kinerja Utama: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal
2. Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sesuai SOP

Seksi Perizinan dan Nonperizinan PM

Kinerja Utama:
Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal, dgn indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal yang dapat diproses

Seksi Fasilitasi PM dan Regulasi Perizinan

Kinerja Utama:
Pengembangan Fasilitasi dan Regulasi Perizinan dan Non Perizinan, dgn indikator:
1. Persentase Kab/ Kota yang menerapkan Kebijakan PM
2. Persentase Kab/ Kota yg mengimplementasikan SPIPISE terkait Perizinan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENINGKATAN NILAI SAKIP

SEKRETARIAT

Kinerja utama:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
2. Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran
3. Peningkatan Kualitas SDM, SKPD
4. Pelayanan Administrasi Keuangan

dgn indikator:

1. Persentase Kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP
2. Persentase aset yang tercatat (harus 100%)
3. Persentase pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD
4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD
5. Persentase Penyerapan Anggaran SKPD
6. Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kinerja Utama:

1. Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD

2. Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran
- dgn indikator:

1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala
2. Jumlah Aset yang diadakan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja Utama:

- Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
- dgn indikator:

1. Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP
2. Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP
3. Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kinerja Utama:

1. Menyusun Data Kepegawaian Evaluasi, serta Administrasi Kepegawaian SKPD
 2. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SKPD
- dgn indikator:

1. Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat
2. Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana
3. Jumlah Pwggawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib
4. Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham

PENINGKATAN INVESTASI

BIDANG
PERENCANAAN
DAN
PENGEMBANGAN

BIDANG
PROMOSI

BIDANG
PENGENDA
LIAN DAN
INFORMASI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BIDANG
PERIZINAN
PRODUKSI
DAN
INDUSTRI

BIDANG
PERIZINAN
SARANA
PEREKON
OMIAN &
SOSIAL

BIDANG
PERIZINAN
PENANAMAN
MODAL

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan**



Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU 2020

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi: 2.12.01.00. -DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Halaman 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.	PENANAMAN MODAL				6.161.600.000,00				11.851.322.112,00
2.12.2.12.01.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD		100%	4.036.000.000,00				7.431.221.120,00
2.12.2.12.01.00.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Banjarbaru	4 dokumen	25.000.000,00		-	4 dokumen	76.032.000,00
2.12.2.12.01.00.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	12 bulan	650.000.000,00		-	12 bulan	975.000.000,00
2.12.2.12.01.00.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Banjarbaru	12 bulan	198.000.000,00		-	12 bulan	293.760.000,00
2.12.2.12.01.00.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	12 bulan	240.000.000,00		-	12 bulan	293.760.000,00
2.12.2.12.01.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	100.000.000,00		-	100 persen	388.247.040,00
2.12.2.12.01.00.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	100.000.000,00		-	100 persen	198.720.000,00
2.12.2.12.01.00.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	43.000.000,00		-	100 persen	88.128.000,00

2.12.2.12.01.00.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	70.000.000,00		-	100 persen	234.144.000,00
2.12.2.12.01.00.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	400.000.000,00		-	100 persen	700.807.680,00
2.12.2.12.01.00.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	Banjarbaru	11 bulan	400.000.000,00		-	1 dokumen	700.807.680,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.01.00.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaianya dilayani secara tertib	DPMPTSP Prov.Kalsel	100 persen	990.000.000,00		-	100 persen	1.775.520.000,00
2.12.2.12.01.00.01.19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaianya dilayani secara tertib	DPMPTSP Prov.Kalsel	100 persen	490.000.000,00		-	100 persen	1.281.294.720,00
2.12.2.12.01.00.01.27.	Penataan Perpustakaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	70.000.000,00		-	100 persen	75.000.000,00
2.12.2.12.01.00.01.34.	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	tersedianya jasa teknis perizinan	Banjarbaru	12 bulan	260.000.000,00		-	12 bulan	350.000.000,00
2.12.2.12.01.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat		100% 100%	1.395.000.000,00				3.155.668.160,00
2.12.2.12.01.00.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah aset yang diadakan	Banjarbaru	1 unit	195.000.000,00		-	100 persen	975.000.000,00

2.12.2.12.01.00.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	Banjarbaru	3 set	100.000.000,00		-	100 persen	316.656.000,00
2.12.2.12.01.00.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	Banjarbaru	10 unit	150.000.000,00		-	100 persen	132.192.000,00
2.12.2.12.01.00.02.11.	Pengadaan Komputer	jumlah aset yang diadakan	Banjarbaru	16 unit	150.000.000,00		-	100 persen	387.123.840,00
2.12.2.12.01.00.02.15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	150.000.000,00		-	100 persen	316.656.000,00
2.12.2.12.01.00.02.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	350.000.000,00		-	100 persen	627.592.320,00
2.12.2.12.01.00.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	100.000.000,00		-	100 persen	200.448.000,00
2.12.2.12.01.00.02.28.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	200.000.000,00		-	100 persen	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.01.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD		100%	85.000.000,00				106.578.432,00
2.12.2.12.01.00.03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Banjarbaru	100 persen	85.000.000,00		-	100 persen	106.578.432,00
2.12.2.12.01.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham		100%	300.000.000,00				450.000.000,00

2.12.2.12.01.00.05.16.	Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	DPMPTSP Prov Kalsel	100 persen	300.000.000,00		-	100 persen	450.000.000,00
2.12.2.12.01.00.06.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan Persentase Aset yang tercatat		BB 10% 100% 90%	345.600.000,00				707.854.400,00
2.12.2.12.01.00.06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Banjarbaru	1 dokumen	15.600.000,00		-	1 dokumen	42.854.400,00
2.12.2.12.01.00.06.55.	Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	Nilai Komponen Perencanaan LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja	Banjarbaru	5 dokumen	300.000.000,00		-	6 dokumen	630.000.000,00
2.12.2.12.01.00.06.74.	Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat	Survey dan tersusunnya dokumen IKM	Banjarbaru	2 dokumen	30.000.000,00		-	1 dokumen	35.000.000,00
2.12.2.12.01.00.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Rencana Investasi		11,7 Triliun Rupiah	3.200.000.000,00				4.900.000.000,00
2.12.2.12.01.00.15.06.	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	jumlah kemitraan dunia usaha	Provinsi Kalimantan Selatan, Nasional	3 kemitraan	420.000.000,00		-	3 kemitraan	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.12.2.12.01.00.15.10.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah potensi investasi daerah yang dipromosikan jumlah pelaksanaan pameran	Provinsi Kalimantan Selatan ; Nasional	15 Potensi 10 kali	1.650.000.000,00		-	15 Potensi 11kali	2.800.000.000,00
2.12.2.12.01.00.15.12.	Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah	jumlah sektor potensi investasi yang teridentifikasi jumlah item/jenis media /bahan promosi investasi	Provinsi Kalimantan Selatan	2 dokumen (sektor) 6 jenis	500.000.000,00		-	2 dokumen (sektor)	700.000.000,00
2.12.2.12.01.00.15.18.	Evaluasi Kebijakan Umum Penanaman Modal	Dokumen evaluasi kebijakan ; Pemetaan Potensi	Provinsi Kalimantan Selatan	1 dokumen (berita acara) 1 dokumen	380.000.000,00		-	1 dokumen	600.000.000,00
2.12.2.12.01.00.15.19.	Forum Investasi Kalimantan Selatan	Persentase Rekomendasi Hasil Forum yang Ditindaklanjuti	Provinsi Kalimantan Selatan ; Nasional	100 persen	250.000.000,00		-	100 persen	300.000.000,00
2.12.2.12.01.00.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN		10,5 Trilyun Rupiah	900.000.000,00				1.750.000.000,00
2.12.2.12.01.00.16.13.	Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Persentase pengawasan perusahaan penanaman modal persentase permasalahan perusahaan yang terselesaikan	13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	40 persen 50 persen	450.000.000,00		-	40 persen	1.000.000.000,00
2.12.2.12.01.00.16.15.	Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Inventarisasi dan Updating data SIPID, investasi, Perizinan dan non perizinan Kab/Kota yang telah menggunakan SIPID dan SIPIPISE terkait LKPM	Provinsi Kalimantan Selatan	100 persen 75 persen	450.000.000,00		-	100 persen	750.000.000,00
2.12.2.12.01.00.19.	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		A (82.50)	1.395.842.750,00				3.355.000.000,00
2.12.2.12.01.00.19.01.	Sosialisasi Perizinan Se Kalsel	Jumlah masyarakat (sasaran) yang menerima sosialisasi jumlah pelaksanaan sosialisasi	Provinsi Kalimantan Selatan	200 orang	200.000.000,00		-	400 orang	900.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.01.00.19.03.	Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	Provinsi Kalimantan Selatan	100 persen	350.000.000,00		-	100 persen	750.000.000,00
2.12.2.12.01.00.19.12.	Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001	ISO 9001	DPMPTSP Prov.Kalsel	1 dokumen	150.000.000,00		-	1 dokumen	400.000.000,00
2.12.2.12.01.00.19.13.	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan penanaman modal	Provinsi Kalimantan Selatan ; 13 Kabupaten/Kota	70 persen	340.000.000,00		-	70 persen	600.000.000,00
2.12.2.12.01.00.19.15.	PEninjauan Lapangan untuk Syarat teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	100 persen	355.842.750,00		-	100 persen	705.000.000,00
TOTAL					11.657.442.750,00				21.856.322.112,00

Banjarbaru, 25 Juni 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. H. NAFARIN, M.P
NIP. 19620513 198903 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemrov Kalsel Jl Bangun Praja
BANJARBARU

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 188.4/075/DPMPTSP/2018

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019**

KEPALA DPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 telah ditetapkan,
b. bahwa menindaklanjuti butir (a), disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Penetapan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019. dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP ini.
- KEDUA : Keputusan ini dipedomani sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak SK ini diterbitkan

Ditetapkan : di Banjarbaru
pada tanggal : 20 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ir. H. Nafarin, MP

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Selatan